

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa perbatasan adalah upaya yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan infrastruktur desa-desa yang berada di wilayah perbatasan antara dua negara atau wilayah administratif yang berbeda. Tujuan dari pembangunan desa perbatasan adalah memperkuat kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa tersebut. (Alfurkon, 2019)

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), pembangunan desa perbatasan adalah pembangunan yang harus mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti keamanan, pemberdayaan ekonomi, akses ke layanan dasar, dan perlindungan hak asasi manusia. Mereka menekankan perlunya melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi pembangunan serta membangun kerjasama antar negara untuk meningkatkan stabilitas dan kemakmuran daerah perbatasan.

Adapun beberapa alasan mengapa membangun desa perbatasan itu penting yaitu: *pertama*, adanya keadilan dan pemerataan pembangunan. Desa perbatasan seringkali mengalami kesenjangan pembangunan yang signifikan dibandingkan dengan daerah lain di negara tersebut. Membangun desa perbatasan merupakan satu langkah penting untuk mencapai keadilan dan pemerataan pembangunan. *Kedua*, mengurangi ketimpangan regional. Pembangunan desa perbatasan juga berkontribusi pada pengurangan

ketimpangan regional. *Ketiga*, keamanan nasional. Desa perbatasan seringkali berada di dekat atau berbatasan langsung dengan negara tetangga. Membangun desa perbatasan secara efektif akan meningkatkan keamanan nasional. Ini melibatkan penguatan pos-pos pengawasan, infrastruktur keamanan, dan kerjasama dengan lembaga keamanan dalam menghadapi potensi ancaman keamanan di wilayah perbatasan. *Keempat*, pertumbuhan ekonomi. Pembangunan desa perbatasan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dengan memperkuat sektor ekonomi lokal, memfasilitasi perdagangan lintas dan meningkatkan konektivitas infrastruktur, serta desa perbatasan bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi berkelanjutan.

Model pembangunan adalah kerangka atau pendekatan yang digunakan oleh pemerintah, organisasi atau ahli dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola proses pembangunan mencerminkan pandangan, strategi, dan prioritas yang dipilih untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi, sosial serta lingkungan yang diinginkan. Terdapat banyak pandangan para ahli mengenai model pembangunan yang ideal. Namun, secara umum sebuah model pembangunan yang ideal harus memperhatikan beberapa aspek yaitu : pertama, keadilan sosial. Model pembangunan yang ideal harus memperhatikan keadilan sosial sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Kedua, keberlanjutan. Model pembangunan yang ideal harus mampu mempertahankan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi.

Model pembangunan yang ideal harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas.

Di Kabupaten Belu sendiri terdapat 11 Kecamatan serta 44 desa yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste (menurut RPJMD Kabupaten Belu tahun 2016-2021), di antaranya yaitu Kecamatan Tasifeo Barat (Desa Lo'okeu), Kecamatan Nanaet Duabesi (Desa Nanaenoe dan Fohoeka), Kecamatan Tasifeto Timur (Desa Dafala, Takirin, Tulakadi, Silawan, Sadi, Sarabau dan Fatuba,a), Kecamatan Lasiolat (Desa Maneikun, Lasiolat, Baudaok dan Fatulotu), Kecamatan Raihat (Desa Asumanu, Tohe dan Maumutin), Kecamatan Lamaknen (Desa Lamaksanulu, Makir, Mahuitas, Duarato dan Maudemu), Kecamatan Lamaknen Selatan (Desa Henes, Lakmaras, Lo'onuna, Lutarato, Sisi Fatukbelar, dan Debululik), Kecamatan Kakuluk Mesak (Desa Fatuketi, Dualaus dan Kenebibi), Kecamatan Kota Atambua (Kelurahan kota, Tenukiik, Fatubenaon dan Manumutin), Kecamatan Atambua Barat (Kelurahan Beirafu, Tulamale, Umanen dan Berdao), Kecamatan Atambua Selatan (Kelurahan Fatukbot, Rinbesi, Manuaman dan Lidak).

Dalam studi kasus ini peneliti mengambil kasus yang terjadi di desa Lo'okeu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Desa Lo'okeu merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Desa Lo'okeu memiliki dua dusun yaitu dusun Klauhalek dan dusun Batulu. Desa Lo'okeu merupakan salah satu Desa di wilayah Pemerintahan Kecamatan Tasifeto Barat, dengan luas wilayah 25.21 m². Desa Lo'okeu

dihuni oleh 165 kepala keluarga dengan presentase jumlah laki-laki sebanyak 313 jiwa dan perempuan sebanyak 325 orang. Mata pencaharian masyarakat desa Lo'okeu yaitu sebagai petani dan peternak. Agama yang dianut oleh penduduk desa yaitu 100% katolik.

Pembangunan yang ada di desa Lo'okeu masih dikatakan kurang dilakukan secara maksimal oleh pemerintah, namun ada beberapa pembangunan yang sudah berjalan sampai sekarang salah satunya yaitu pembangunan jalan sabuk merah sepanjang 7.000 meter, atau 7km², pembangunan pembangkit listrik tenaga angin, pembangunan rumah layak huni kepada sekitar 50 kepala keluarga, adanya pipanisasi air bersih yang dialirkan kepada 74 rumah dengan masing-masing penarikan pipa dari sumber mata air sekitar 3 km. dan untuk membangun desa dan masyarakat agar lebih inovatif telah dilakukan beberapa upaya pembangunan dengan membuat program Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dikhususkan kepada ibu-ibu dan anak muda di desa untuk berinovasi yaitu dengan menenun dan mewarnai kain dengan menggunakan pewarna alami dari daun dan akar tanaman tertentu serta memasak dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang mudah didapat di desa seperti pisang (kulitnya bisa dibuat anggur fermentasi), bahan-bahan dapur bisa di buat bumbu-bumbu masakan. Selain pembangunan ada juga BumDes desa Lo'okeu yang bergerak di bidang simpan pinjam. Namun pembangunan ini nyatanya belum dilakukan secara maksimal hal ini dibuktikan dengan belum adanya pemaksimalan pembangunan seperti pada pipanisasi air bersih dengan masih sekitar 82 kepala keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih secara

langsung, rendahnya pendidikan karena minimnya sarana dan fasilitas pendidikan dimana di desa Lo'okeu hanya terdapat satu unit SD dan satu unit PAUD, minimnya sarana dan fasilitas kesehatan dimana di desa Lo'okeu hanya terdapat satu posyandu yang hal ini tentunya sangat menyulitkan warga masyarakat yang ingin berobat dimana mereka harus menempuh perjalanan sekitar satu jam ke puskesmas terdekat. Perkembangan Bumdes juga masih belum baik, hal ini dikarenakan adanya beberapa masalah yang dihadapi yaitu; 1) rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat BumDes untuk perkembangan ekonomi desa. 2) perlu kajian untuk menentukan unit usaha yang sesuai dengan potensi desa Lo'okeu, 3), pengembalian yang cukup macet untuk unit simpan pinjam.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia 2018, indeks pembangunan desa merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. IPD 2018 bersumber dari hasil pendataan podes 2018 yang mencakup atas 5 dimensi dan 42 indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa. Hasil IPD 2018 menunjukkan ada 5.606 desa mandiri, 53.369 desa berkembang dan 14.461 desa tertinggal. Secara nasional desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai IPD sebesar 59,36. Desa Lo'okeu masih dikatakan sebagai desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2023 dengan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) tahun 2023 sebesar 0,7371, IKE tahun 2023 sebesar 0,5167, IKL sebesar 0,6667, dan IDM sebesar 0,6402

Pembangunan daerah perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah perbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut. Secara garis besar, permasalahan pembangunan daerah perbatasan mencakup : permasalahan geografis dan topografi wilayah, permasalahan yang berdimensi lokal berupa kemiskinan dan berdimensi nasional berupa ekonomi ilegal. Dari beberapa masalah di atas maka diperlukan adanya sebuah model pembangunan yang digunakan agar pembangunan di desa perbatasan itu harus lebih fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah perbatasan dengan mengambil judul **“MODEL PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PERBATASAN (Studi Kasus Model Pembangunan Desa Perbatasan, Desa Lo’okeu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu)’**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Model Pembangunan yang cocok yang dapat digunakan oleh pemerintah Desa dalam membangun Desa Perbatasan (Studi Kasus Model Pembangunan Desa Perbatasan, Desa Lo'okeu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Model Pembangunan Masyarakat Desa Perbatasan (Studi Kasus Model Pembangunan Desa Perbatasan, Desa Lo'okeu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu).

1.4 Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian, adapun yang menjadi manfaat penelitian ini , Yaitu :

- a. Manfaat Teoritik dari studi ini yaitu berkontribusi penting dalam menambah serta memperkaya literatur ilmiah tentang tata kelola perbatasan.
- b. Manfaat Praktis dari studi ini yaitu dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian tentang politik tata perbatasan.